

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). Hukum Adat di Indonesia. Pusaka Media.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). Hukum Pidana. Vol. 11. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Djamali, Abdoel. (2014). Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Prasetyo, Teguh. (2010). Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Halim Barkatullah. (2012). Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2019). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat.
- Renggong, Ruslan. (2016). Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Jakarta: Kencana.
- Rosyadi, I. (2022). Hukum Pidana. Revka Prima Media.

Rifai, Ahmad. (2014). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Saragih, Y. M., Alwan Hadiyanto, & Prasetyo, M. S. E. (2022). Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia. In Unpam Press (Issue 1). CV. Tungga Esti.

Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Angga Eko Prasetyo, Sukendar, and Gerardus Gegen. (2024). Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Subekti. (2021). Hukum Pembuktian. Jakarta Timur: Balai Pustaka.

Subiyanto, Achmad Edi, and Oly Viana Agustine. (2019). Yurisprudensi Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Depok: Rajawali Pers.

Syamsuddin, Azis. (2011). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika.

Umar, Dzulkifli, and Jimmy P. (2022). Kamus Hukum. Surabaya: Grahamedia.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Wibowo, Agus, Ratnawati, Asri Reni Handayani, Zico Junius Fernando, Elizawarda, Dina Indriyanti, Alif Lukmanul Hakim, Yusuf Kurniadi, Jusuf Kristianto, Abdul Karim, Yusep Rafiqi, Uly Desmarnita, Eko Rahman Setiawan, Sahala Martua Solin, dan Sugih Wijayati. (2022). Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas. Diedit oleh Z. Z. Mutaqin. Bandung: Media Sains Indonesia.

Panggabean, H. P. (2014). Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: PT. Alumni.

Hulukati, Tien S. (2013). *Delik-Delik Khusus di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Fakultas Hukum Unpas.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh Utara: Unimal Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL:

Anggoro, Firna Novi. (2017). Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647.

Asmuni. (2024). Klasifikasi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 4(6), 2071–2080.

Adnyana, W. A. S., Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. R. (2021). Analisis Yuridis Atas Penetapan Status Tersangka (Studi Kasus Upacara Ngaben Tahun 2020 di Desa Sudaji). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 170–182.

Hartono, M. S. (2016). Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2), 211–227.

Hartono, M. S. (2025). Transparency of Campaign Funds as a Strategy for Eradicating Criminal Acts of Corruption. *ICLSSE*, 221, 1–10.

Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana

Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 112–128.

Kristina, L. D., Sudiatmaka, K., & Hartono, M. S. (2021). Kedudukan dan Hak Mewaris Anak Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Perean, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 334–343.

Lingga, J. W., & Made Sugi Hartono, N. K. S. A. P. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Kampus Undiksha Jinengdalem (Studi Putusan No.51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS). *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2), 464–474

Batubara, R. (2024). Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia. *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 2(1), 71–92.

Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336–342.

Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, I. Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, dan Ni Putu Ayu Mandalay. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Oleh Bendesa Adat Terhadap Investor di Bali. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 19(1), 58–62.

Hasanah, H. (2023). Analisis Kritis terhadap Kekuasaan Kehakiman: Implikasi Yurisprudensi dalam Reformasi Peradilan. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(4), 43–50.

- Harini, Mediana, dan Diding Rahmat. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence of Law*, 4(1), 207–230.
- Lalu, R. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5), 28–35.
- Lingga, Jose Widyatama dan Ni Ketut Sari Adnyani Program Made Sugi Hartono. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Kampus Undiksha Jinengdalem (Studi Putusan No.51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS). *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2), 464–474.
- Manuaba, I. B. G. P. P. (2025). Kedudukan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Dalam Mengatur Pewarisan Wanita Hindu Bali Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(4), 357–369.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim. *Al-Hukama'*, 7(1), 224–248.
- Murdiana, E. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya. *Al-Mawarid*, 12(1), 1–18.
- Putra, Komang Deva Jayadi, Made Sugi Hartono, dan I Wayan Lasmawan. (2025). Disparitas Sanksi Pidana Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Locus Delicti*, 6(2), 63–71.
- Prathama, Anak Agung Gede Agung Indra. (2022). Desa Adat Sebagai Subyek Hukum Dalam Struktur Pemerintahan Provinsi Bali. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 62–70.

Veren Sempo, Rompas, D., & Gerungan, C. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi Ditinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 13(4), 1–12.

Wahyudi, I. (2023). Pengaruh Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Menyelaraskan Penegakan Hukum di Daerah. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 1(3), 50–57.

Wayan Sudiana, I., Made Wisni Arie Pramuki, N., Wayan Alit Erlinawati, N., Dewi Pradnyawati, K., & Nuniek Hutnaleontina, P. (2025). Mengungkap Peran Desa Adat Dalam Praktik Tata Kelola LPD di Bali. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 16(2), 240–258.

Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 86–108.

Widjaja, G., & Suhardiman, C. (2025). Yurisprudensi Sebagai Sumber Pembaruan Hukum Dalam Sistem Civil Law Indonesia: Kajian Pustaka Atas Fungsi Penemuan Hukum Oleh Hakim. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 4(1), 98–105.

KARYA TULIS:

Giri, P. Rizky Marlinda Utami. (2018). Analisis Fungsi dan Tugas Kelian Adat di Dalam Administrasi Kedesaan Adat di Bali. Universitas Brawijaya.

WEBSITE:

Mahendro, Aryo. (2024). Korupsi Dana BKK: Bendesa Adat Tista Divonis Setahun Bui, Bendahara Lebih Berat. Detikbali. Retrieved from <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7700464/korupsi-dana-bkk-bendesa-adat-tista-divonis-setahun-bui-bendahara-lebih-berat>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps